

A. Latar Belakang Masalah

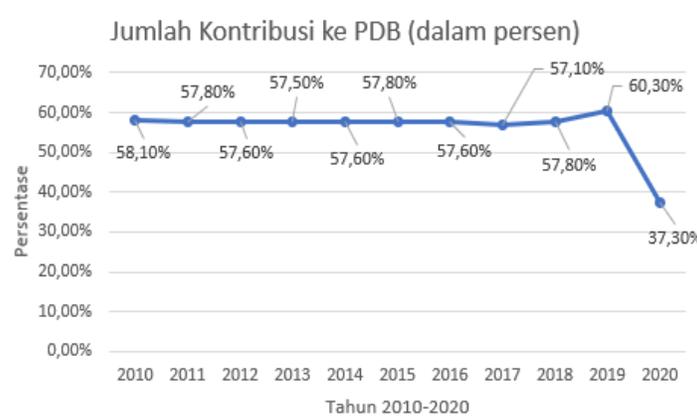
Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai macam dinamika permasalahan di Indonesia yang tidak hanya berimbas terhadap sektor kesehatan melainkan juga berdampak terhadap sektor ekonomi. Hingga pertengahan tahun 2021 jumlah kasus Pandemi Covid-19 masih saja dan terus meningkat terutama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini ditunjukkan melalui data yang didapatkan oleh situs resmi Pemerintah Provinsi DIY bahwasannya kasus positif hingga 9/8/2021 adalah 129.881 pasien positif dan 89.730 pasien sembuh dari Covid-19 (corona.jogjaprov.go.id, 2021). Dengan meningkatnya kasus positif tersebut menyebabkan salah satu sektor ekonomi menjadi terdampak terkhusus bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi DIY (Pakpahan, 2020).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang sering disebut sebagai UMKM merupakan salah satu bentuk dari pergerakan perekonomian produktif oleh masyarakat (Sari, 2020). UMKM juga merupakan salah satu bentuk dari gerakan perekonomian kerakyatan yang karenanya masyarakat diharapkan turut andil dalam perkembangan perekonomian terutama ditengah Pandemi Covid-19 (Rakhmawati, 2019). UMKM itu sendiri tidak dapat diklasterisasikan hanya dalam satu jenis saja melainkan terdapat beberapa perbedaan mendasar sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Salah satu produk kebijakan terbaru terkait UMKM diantaranya diatur dalam UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang tertera dalam pasal 86, pasal 87, pasal 88, pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 93, pasal 94, pasal 104 dan pasal 185 huruf b yang kemudian diimplementasikan kedalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Sumampouw et al., 2021). Dinamika kebijakan tersebut

tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan stimulasi kemudahan bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Grafik 1.1 Jumlah Kontribusi UMKM ke PDB Nasional



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Data Diolah Peneliti (2021)

Jumlah UMKM di Indonesia didominasi oleh UKM (Usaha Kecil dan Mikro) yang secara nasional adalah berjumlah 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari jumlah keseluruhan sektor usaha (Bahtiar, 2021). Dari banyaknya jumlah tersebut beberapa keuntungan selain membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Seperti yang tertera pada **Grafik 1.1** diatas bahwasannya sepanjang kurun waktu 9 tahun terakhir (2010-2019) Kontribusi UMKM terhadap PDB memiliki angka yang relative stabil. Peningkatan drastis terjadi pada tahun 2019 dimana kontribusi UMKM kepada PDB mencapai angka 60,30% sekaligus menjadi rekor terbaru yang membanggakan. Tetapi, hadirnya Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar dimana kontribusi UMKM terhadap PDB menurun drastis hingga merengsek ke angka 37,30% (Kemenkopukm.go.id, 2021).

Survey BPS yang dilakukan untuk mengukur terkait dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelaku usaha pada tahun 2020 berhasil mengumpulkan 34.599 Responden dengan jumlah responden pada bidang UMK yakni 25.526. Hasil survey tersebut menghasilkan bahwasannya 33,23 % UMK melakukan pengurangan jumlah terhadap pegawainya dan penurunan pendapatan

hingga 84,20% (bps.go.id, 2020). Hal tersebut senada dengan survei yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama JERCovid-19 bahwasannya pedapatan UMKM di DIY menurun hingga 80% (Evani, 2020). Bahkan, sekitar 44% UMKM di DIY juga melakukan *lay-off* atau menekan jumlah pekerja dengan merumahkan beberapa pegawainya dikarenakan penurunan pendapatan yang cukup ekstrim (corona.jogjaprovo.go.id, 2020).

Respons Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terkait *collapse*-nya UMKM kemudian dirumuskan kedalam sebuah Surat Edaran Gubernur tertanggal 14 Mei 2020 Nomor 519/7669 Tentang Himbauan Pembelian Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Wilayah DIY. Pemerintahan provinsi DIY beserta jajarannya dituntut aktif serta cepat dalam mengaplikasikan SE Gubernur tersebut agar kedepannya dapat membentuk sebuah dinamika inovasi atau kebaruan yang berdampak positif bagi masyarakat serta UMKM ditengah pandemic Covid-19. Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang cergas (*Agile Governance*) menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan inovasi yang cepat serta adaptif dalam situasi dan kondisi masyarakat seperti saat ini (Hulu et al., 2020). Dengan adanya sebuah tata kelola yang responsive dan *agile* maka pemerintah dapat dengan segera mencetuskan terobosan yang inovatif bagi sektor-sektor terdampak di masyarakat terutama ditengah krisis multidimensi Pandemi Covid-19 (Zulyani & Meiwanda, 2020).

Oleh karena itu, Terdapat berbagai macam inovasi yang dikeluarkan oleh Pemda DIY namun salah satu yang menjadi fokus dari penelitian ini terkait sektor UMKM adalah Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha Jogja (Sibakul Jogja) (Prasetyo, 2020). Sibakul Jogja merupakan Inovasi yang diinisiasi oleh Dinkop UKM DIY yang sudah dirilis pada tahun 2019 silam (Alfin, 2021). Tujuan dari adanya inovasi pembentukan Sibakul Jogja ini adalah sebagai wadah pembinaan dan koperasi bagi pemilik UMKM di Provinsi DIY itu sendiri yang

hingga saat ini sudah berjumlah 1.219 Pemilik Usaha yang bergabung (Husa, 2020). Kemudian, hal yang menarik dari Sibakul Jogja adalah baru-baru ini masuk Top 40 Inovasi Pelayanan public berdasarkan Keputusan MenPAN-RB Nomor 1024 Tahun 2021 (krjogja.com, 2021).

Walaupun di Provinsi DIY terdapat banyak inovasi pelayanan publik seperti *electronic government* yakni E-LAPOR bagi Pemerintah Provinsi DIY (U. Hadi, 2018), *Jogja smart services* (JSS) bagi Pemkot Yogyakarta (Fitriana, 2021), Dukcapil Smart Bantul bagi Pemkab Bantul (Hasanudin, 2020), Lapor Sleman bagi Pemkab Sleman (Setyawan, 2020) dan aplikasi layanan lainnya. dari beberapa inovasi tersebut, yang menjadi unggul serta dekat dengan UMKM adalah inovasi Sibakul Jogja salah satunya untuk merespons keadaan ditengah Pandemi Covid-19. Inovasi Sibakul Jogja memiliki beberapa layanan seperti Markethub Free Ongkir, Galeri Pasar Kota Gede YIA, Layanan Data KUKM, Kesehatan Koperasi, Aplikasi Manajemen Koperasi, Aduan Anggota Koperasi, Desapreneur. Dari beberapa layanan tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwasannya posisi Sibakul Jogja merupakan sebuah inovasi yang strategis bagi UKM terutama ditengah Pandemi Covid-19.

Inovasi Sibakul Jogja menjadi salah satu analisis yang menarik apabila dilihat dari kacamata *Agile Governance*. Konsep *Agile* tersebut muasalnya memang dilaksanakan terlebih dahulu pada sektor perusahaan swasta terkait dengan kecepatan dan ketepatan inovasi yang diberikan (Kurniawan et al., 2020). Sibakul Jogja sebagai saah satu inovasi yag dekat dengan UMKM perlu untuk terus mengembangkan secara cepat inovasi dan pelayanannya sehingga analisis mengenai kajian *agile governance* perlu dilakukan. Semakin berkembangnya waktu konsep *Agile Governance* perlu diadopsi bagi Organisasi Pemerintah Daerah dikarenakan menyesuaikan kebutuhan serta kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik. Oleh karena itu, Luna, Kruchten dan Moura (2015) berpendapat bahwasannya *Agile Governance* merupakan

sebuah kemampuan dari *human societies* yang dapat menciptakan inovasi dengan beradaptasi secara cepat, tepat dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan lingkungan terkini (Vernanda, 2019). Terdapat 6 prinsip dalam menjalankan *Agile Governance* menurut Luna dkk (2015) diantaranya *Good enough governance, Business-driven, Human focused, Based on quick wins, Systematic and Adaptive approach* dan *Simple design and continuous refinement* (Luna et al., 2015).

Agile Governance menjadi sebuah konsep yang digaung-gaungkan akhir-akhir ini sehingga *novelty* dari penelitian ini adalah bahwasannya khazanah penelitian terkait *agile governance* masih sangat minim dan perlu untuk dikembangkan secara lebih luas. Disisi lain, penelitian ini dilakukan ditengah Pandemi Covid-19 dan menganalisis terkait Penerapan Implementasi dari *Agile Governance* di Lingkungan Pemerintah Daerah Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam bentuk *platform* Sibakul Jogja bagi UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Kasus Pandemi Covid-19 yang belum mereda hingga saat ini menimbulkan beberapa kompleksitas problematis salah satunya adalah terkait dengan Pendapatan UMKM yang menurun dan juga terkait Pemerintahan yang perlu untuk menerapkan *Agile Governance* dalam situasi seperti ini yang salah satu bentuk konkrit adalah dengan munculnya inovasi pembuatan Wadah UMKM yang diberi nama “Sibakul Jogja ”. Oleh karena itu, dengan menyimpulkan serta mengerucutkan dinamika tersebut maka penelitian ini akan mengambil sebuah Rumusan Permasalahan yakni **“Bagaimana Penerapan *Platform* Sibakul Jogja Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Perspektif *Agile Governance*?”**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyelenggaraan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi ataupun penerapan dari adanya Sibakul Jogja dari Pemerintah Provinsi DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY bagi UMKM dalam wujud Perspektif *agile governance*. Dengan mengetahui dinamika dari implementasi tersebut maka peneliti mampu untuk semakin memperdalam kajian tersebut agar dapat menganalisis secara lebih jauh dan memberikan manfaat yang kongkrit baik dalam wujud penelitian ataupun sebagai bahan evaluasi dari Pemerintah agar lebih baik kedepannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta khazanah keilmuan bagi Ilmu Pemerintahan secara umum. Kemudian, hal fundamental lainnya adalah dikarenakan kajian ataupun artikel terkait dengan *Agile Governance* di Indonesia masih minim maka penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menciptakan peluang penelitian yang berkelanjutan bagi isu-isu terkait pelayanan pemerintahan dan kebijakan public.

2. Manfaat Praktis

Penelitian terkait dengan *Agile Governance* akan berhubungan erat dengan adanya peningkatan kapasitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama bagi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya penelitian terkait dengan *agile governance* ini juga diharapkan dapat menjadi acuan terkait perumusan inovasi pemerintah terhadap sebuah situasi krisis seperti Pandemi Covid-19 ini. Disisi lain, secara futuristik kebermanfaatan penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan untuk selalu tanggap dalam menciptakan inovasi yang dapat berguna bagi masa depan terutama dalam hal pelayanan

kepada UMKM seperti Sibakul Jogja ini. Manfaat lainnya adalah sebagai salah satu evaluasi bagi Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk dapat selalu memaksimalkan sistem pelayanan UMKM melalui Sibakul Jogja agar tetap berkelanjutan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian perlu untuk memberikan beberapa perbandingan antara penelitian saat ini dengan beberapa penelitian terdahulu agar posisi serta *novelty* yang didapatkan semakin kuat, berikut beberapa kajian serta analisis perbandingan antara penelitian penyusun dan penelitian terdahulu:

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian terdahulu	Penelitian penyusun
1	Rengga Vernanda (2020)	Kesiapan Indonesia Menuju <i>Agile Governance</i>	Artikel tersebut membahas terkait bagaimana konsep <i>agile governance</i> dapat diterapkan di lingkungan Pemerintahan.	Fokus Penelitian dalam artikel tersebut tidak secara spesifik menganalisis suatu Pemerintahan daerah/provinsi di Indonesia melainkan menganalisis secara keseluruhan berdasarkan indeks penggunaan IT di setiap wilayah Indonesia serta membandingkannya dengan negara-negara di ASEAN	Artikel Penulis lebih memfokuskan terkait implementasi <i>agile governance</i> secara spesifik yakni di Provinsi DIY dan juga menjadikan salah satu produk dari Dinas KUKM Provinsi DIY yakni Sibakul Jogja menjadi fokus penelitian.
2	Danar Ilham Kurniawan, Akbar Maulana	<i>Agile Governance</i> Sebagai	Artikel tersebut membahas terkait kesiapan	Penelitian tersebut menemukan	Penelitian ini tidak membahas

	dan Itok Wicaksono (2020)	Bentuk Transformasi Inovasi Pemerintah Daerah	konsep <i>Agile governace</i> yang diukur pada suatu Pemerintah Daerah	bahwasannya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menciptakan beberapa inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah seperti <i>e-kinerja</i> dan mall pelayanan publik.	secara keseluruhan bagaimana perkembangan <i>agile governance</i> secara keseluruhan dalam sebuah pemerintahan melainkan hanya memfokuskan kepada 1 produk inovasi yakni Sibakul Jogja.
3	Eka Putri Zulyani dan Geovani Meiwanda (2020)	<i>Agile Government</i> dalam Mewujudkan Birokrasi yang Berkelas Dunia	Penelitian pada artikel tersebut membahas terkait penatakelolaan birokrasi secara <i>agile</i> dalam lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah.	Pembahasan dalam artikel tersebut berkaitan dengan reformasi birokrasi sehingga tidak secara spesifik membahas bagaimana <i>agile government</i> diterapkan sebagai konsep utama dan pada lingkup yang spesifik seperti pada salah satu organisasi pemerintahan daerah ataupun inovasi-inovasinya.	Penelitian ini membahas secara rinci bagaimana konsep <i>agile governance</i> dalam implementasinya didalam sebuah OPD melalui inovasi-inovasi yang diberikan sehingga pembahasannya akan lebih terstruktur dan terfokus.
4	Wahyudi Kumorotomo (2020)	<i>Envisioning Agile Government : Learning From the Japanese Concept of Society 5.0</i>	Penelitian dalam Artikel tersebut membahas sebuah inovasi yang hadir baik dari dalam ataupun dari	Pembahasan dalam penelitian tersebut menganalisis terkait sebuah perusahaan yakni Go-Jek yang mampu merubah	Walaupun Penelitian tersebut memfokuskan sebuah inovasi diluar pemerintahan (Go-Jek) tetapi

		<i>and the Challenge of Public Administration in Developing Countries</i>	luar pemerintahan yang secara langsung dapat memberikan <i>impact</i> bagi pendapatan negara melalui konsep <i>agile government</i> .	transformasi perjalanan melalui digital dan tentunya dapat ber- <i>impact</i> terhadap pendapatan negara dan penelitian tersebut juga memfokuskan terkait perbandingannya terhadap Administrasi Publik yang ada di Jepang dengan fokus <i>society 5.0</i> .	dalam artikel ini akan membahas inovasi yang muncul dari Pemerintah yakni Sibakul Jogja sebagai bentuk dari <i>agile governance</i> bagi UMKM.
5	Farhan Rahmawan Halim, Feni Astuti dan Khaerul Umam (2021)	Implementasi Prinsip <i>Agile Governance</i> Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat	Penelitian dalam Artikel tersebut menggunakan 3 Prinsip <i>Agile Governance</i> sebagai pisau analisis dalam menilai Aplikasi PIKOBAR ditengah Pandemi Covid-19.	Secara umum, penelitian tersebut memfokuskan Aplikasi Pelayanan PIKOBAR milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk atau respons akibat adanya Pandemi Covid-19.	Penelitian dalam Artikel ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Walaupun menggunakan teori <i>agile governance</i> tetapi fokus penelitian serta objek penelitian berbeda dari artikel sebelumnya.
6	Adella Intan Pertiwi dan Awang Darumurti (2021)	<i>Collaborative Governance in Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises Through Sibakul</i>	Penelitian dalam Artikel tersebut membahas sebuah inovasi yang dikeluarkan oleh Dinkop UKM DIY yakni Sibakul Jogja. Sebagai	Pembahasan dalam artikel tersebut menggunakan <i>collaborative governance</i> sebagai salah satu pisau analisis utama untuk mengetahui pola keterhubungan	Artikel yang dibahas akan lebih menggunakan pisau analisis <i>agile governance</i> dikarenakan untuk mengukur bagaimana

		<i>Jogja free- Ongkir During Covid-19</i>	sebuah inovasi, Sibakul Jogja beradaptasi serta membangun hubungan dengan berbagai pihak agar seluruh UMKM di DIY dapat mendapatkan akses <i>digital marketing</i> yang sama	dan keterkaitan antara Sibakul Jogja, UMKM, JKN, Gojek dan Grab-food.	inovasi dari Dinas KUKM Provinsi DIY dapat berjalan dengan baik bagi UMKM di wilayah Provinsi DIY. Disisi lain, Pembahasan <i>agile governance</i> yang masih minim di Indonesia perlu untuk dikembangkan salah satunya melalui artikel ini.
7	Nur Faidati, Muhammad Khozin dan Gerry Katon Mahendra	<i>SiBakul Jogja Free Shipping : Empowerment to Turn on the Economy of Yogyakarta 's MSMEs in Pandemic Era</i>	Artikel tersebut memiliki kesamaan untuk mengetahui bagaimana program Sibakul Jogja dijalankan ditengah Pandemi Covid-19	Artikel tersebut membahas terkait keberlanjutan inovasi oleh Dinkop UKM DIY yakni Sibakul Jogja dijalankan ditengah Pandemi covid-19 salah satunya melalui terobosan <i>free-shipping</i> .	Pada arikel tersebut hanya membahas Sibakul Jogja secara umum dan tidak secara mendalam dikaitkan dengan teori dalam Pemerintahan. Sedangkan, Artikel ini mengukur implementasi dari <i>Agile Governance</i> bagi UMKM melalui Sibakul Jogja sehingga pembahasan akan lebih mengerucut melalui pisau

					analisisnya yakni implementasi dari <i>agile governance</i> .
8	Palupi Sri Wijayanti, Wibawa dan Titik Mulat Widyastuti (2021)	Pendampingan Pelaku UMKM Wanita untuk Memaksimalkan Ikan Marketing Melalui Aplikasi Sibakul Jogja	Artikel tersebut membahas terkait Sibakul Jogja yang menjadi <i>marketplace</i> yang dikelola oleh Dinkop KUKM Provinsi DIY.	Artikel tersebut merupakan artikel pengabdian masyarakat yang difokuskan untuk membantu <i>digital marketing</i> dari Pelaku UMKM Wanita agar memberikan produk yang menarik di Sibakul Jogja	Penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis bagaimana Sibakul Jogja dapat dijalankan secara berkelanjutan tentunya melalui pisau analisis <i>agile governance</i> sehingga penelitian ini berbeda dengan artikel sebelumnya.
9	Sofjan Aripin, Rulinawaty dan Lukman Samboteng (2020)	<i>Agile Bureaucracy for Public Policy Accountability: Implementation of the Street Vendor Policy in Indonesia</i>	Artikel tersebut memiliki fokus terkait <i>Agility</i> dalam birokrasi untuk menciptakan sebuah inovasi atau implementasi kebijakan salah satunya bagi UMKM yakni Pedagang Kaki Lima (PKL)	Secara lebih mendalam, artikel tersebut memiliki temuan bahwasannya birokrasi yang <i>agile</i> tidak dapat tercipta secara mudah didalam susunan atau hirarki birokrasi yang rumit. Perlu ada proses yang panjang, salah satunya untuk menciptakan kebijakan yang dapat terimplementasi bagi PKL dan dapat difahami oleh seluruh	Sedangkan, penelitian ini secara lebih lanjut membahas salah satu dari inovasi birokrasi yakni Dinkop UKM DIY dalam menciptakan sebuah <i>platform</i> bagi UMKM yang diukur melalui <i>agile governance</i> .

				sektor PKL tersebut.	
10	Linda Susan Holbeche (2019)	<i>Shifts In Organizational Culture When Implementing Agility</i>	Pembahasan dalam artikel tersebut memiliki kesamaan terkait sebuah birokrasi dalam pemerintahan yang perlu berubah dalam mempersiapkan serta menciptakan proses dan pelaksanaan kinerja yang <i>agile</i>	Didalam penelitian tersebut terdapat hasil penelitian yang memberikan kesimpulan bahwasannya untuk menciptakan organisasi publik yang <i>agile</i> tidak dapat tercipta dengan mudah dikarenakan perlunya untuk menghilangkan batasan struktur organisasi yang tradisional (berpaku pada sistem) sehingga terciptanya inovasi yang dapat berorientasi terhadap <i>user</i> .	Penelitian ini memiliki batasan untuk membahas terkait birokrasi yang <i>agile</i> melalui kacamata <i>agile governance</i> dengan inovasinya yakni Sibakul Jogja.
11	Saut Sagala, Arief Rosyidie, Amesta K. Ramadhani, Danang Azhari, Alma N. Annisa, Rufaida N. Veri dan Muhammad Dimas Mahardika (2020)	<i>Covid-19 in Indonesia: An Analysis of DKI Jakarta's Covid-19 Pandemic Response and its Governance During the New Normal Period</i>	Penelitian ini memiliki persamaan fokus penelitian bahwasannya untuk mempercepat penanganan Pandemi Covid-19 dibutuhkan implementasi kebijakan serta pergerakan birokrasi yang harus cepat.	Hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa terdapat penanganan pandemi Covid-19 yang tidak dapat mengatasi secara langsung target dari pemerintah yakni pelandaian kasus Pandemi. Dibutuhkan kolaborasi serta kerjasama seluruh sektor untuk	Penelitian ini memiliki fokus atau lingkup yang berbeda dimana penelitian ini lebih berfokus untuk megimplementasikan <i>agile governance</i> melalui layanan Sibakul Jogja bagi UMKM di Provinsi DIY melalui Dinkop UKM DIY

				menciptakan birokrasi yang andal, tanggap serta tepat dalam menangani Pandemi Covid-19 salah satunya melalui terciptanya <i>agile governance</i> .	
12	Kiki Aprilyanti, M. Daud Irsya Latif dan Dyah Mutiarin (2021)	Narasi Budaya Arek Suroboyo dan Pandemi Covid-19: Sebuah Perspektif <i>Agile Governance</i> di Kota Surabaya	Penelitian tersebut memiliki persamaan dikarenakan analisis menggunakan <i>agile governance</i> bagi implementasi kebijakan pemerintah terutama ditengah Pandemi Covid-19	Hasil penelitian tersebut menyatakan bawasannya narasi implementasi kebijakan publik yang diberikan oleh pemerintah pusat perlu diartikan secara tersendiri bagi pemerintah surabaya dikarenakan adanya budaya yang sudah melekat seperti <i>cangkrukan</i> (Mengobrol berkerumun) yang tentunya dibutuhkan organisasi yang <i>agile</i> agar dapat tetap menangani Pandemi melalui pendekatan kultural yang tepat	Penelitian ini memfokuskan pembahasan melalui Inovasi dari organisasi publik yang <i>agile</i> dalam merespon adanya Pandemi Covid-19 terutama dalam bidang UMKM.
13	Thailana Lima, Carlos Eduardo Barbosa dan Jano Moreira de Souza (2017)	<i>Analysing Agile Governance Processes in the Brazilian</i>	Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini	Penelitian tersebut membahas bagaimana kualitas dari <i>agile governance</i> di	Penelitian ini berbeda dari penelitian tersebut walaupun memiliki

		<i>Government Scenario</i>	terkait analisis sebuah pemerintah/org anisasi pemerintah melalui kaca mata <i>agile governance</i> dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Pemerintahan Brazil dimana memiliki hasil bahwa pemerintah masih perlu untuk meningkatkan kualitasnya terutama dalam hal IT <i>Governance</i> yang menjadi salah satu inovasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan Brazil.	kacamata yakni melalui <i>agile governance</i> dimana penelitian ini lebih membahas inovasi yang diberikan melalui Dinkop UKM DIY dalam bentuk Sibakul Jogja.
14	Yeni Rosilawati, Adhianty Nurjanah dan Husni Amriyanto (2020)	<i>The Use of "Jogja Istimewa" for Improving E-Government and Public Service Delivery in Yogyakarta</i>	Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terkait inovasi yang diberikan berbasis layanan yakni Jogja Istimewa yang didalamnya juga terdapat informasi kuliner UMKM di DIY	Penelitian tersebut menggunakan pisau analisis <i>e-government</i> dalam menelaah pelayanan publik di wilayah DIY melalui Aplikasi Jogja Istimewa	Penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis salah satu inovasi dari Dinkop UKM Provinsi DIY melalui kacamata <i>agile governance</i>
15	Vivek Soundrarajan, Sreevas Sahasranamam, Zaheer Khan dan Tanusree Jain (2021)	<i>Multinational Enterprises and the Governance of Sustainability Practices in Emerging Market Supply</i>	Penelitian tersebut memiliki kesamaan adalah terkait penggunaan kacamata analisis yakni <i>agile governance</i> terhadap	Artikel tersebut secara umum tidak membahas hubungan antara <i>agile governance</i> dengan birokrasi pemerintahan melainkan bagi perusahaan multinasional yang kemudian	Penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini disebabkan jikalau penelitian

		<i>Chains: An Agile Governance Perspektif</i>	peningkatan kapasitas perusahaan multinasional	dietuskan mejadi ASG (<i>agile sustainability governance</i>) bagi perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan sayapnya pada bidang usaha. Pada dasarnya, memanglah <i>agile governance</i> merupakan sistem yang dikembangkan oleh perusahaan yang kemudian diadopsi kedalam birokrasi pemerintahan dalam rangka percepatan pelayanan kepada publik.	sebelumna lebih memfokuskan <i>agile governance</i> bagi perusahaan maka penelitian ini membahas <i>agile governance</i> yang diterapkan dalam organisasi pemerintah daerah Dinkop UKM DIY yang diwujudkan melalui platform Sibakul Jogja.
16	Marijn Jenssen dan Haiko Van Der Vort (2020)	<i>Agile and Adaptive Governance in Crisis Response: Lessons from the COVID-19 Pandemic</i>	Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terkait penggunaan kacamata analisis <i>agile governance</i> dalam menangani kasus pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah beserta jajarannya	Penelitian tersebut tidak berfokus terhadap pengelolaan penanganan Pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia melainkan di Belanda. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa konsep <i>Agile</i> dan <i>adaptive governance</i> memiliki perbedaan secara praktis ataupun secara teoritis. Hal tersebut juga yang	Penelitian ini lebih berfokus terhadap <i>agile governance</i> yang diukur dalam ruang lingkup inovasi yang berkelanjutan terutama ditengah Pandemi Covid-19.

				melatarbelakangi penelitian ini dilaksanakan untuk mengukur keduanya dalam penanganan pandemi Covid-19	
17	Ines Mergel, Yiwei Gong dan John Bertot (2018)	<i>Agile Government : Systematic Literature Review and Future Research</i>	Persamaan penelitian tersebut adalah terkait bagaimana <i>agility</i> dapat tercipta dalam ruang lingkup pemerintahan dan birokrasi atau tata kelolanya.	Penelitian tersebut lebih memfokuskan terkait pengenalan <i>agile government</i> dari berbagai dokumentasi dan literatur yang dapat menjadi sebuah penelitian lanjutan dan dilaksanakan dengan metode seperti studi kasus ataupun kuesioner	Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah bahwasannya penelitian sebelumnya memfokuskan <i>agile government</i> sedangkan penelitian ini memfokuskan pisau analisis melalui <i>agile governance</i> dengan metode studi kasus.
18	Anthony Simonofski, Hajer Ayed, Benoit Vanderose, Monique Snoeck (2018)	<i>From traditional to agile E-government service development : Starting from Practitioner s' challenges</i>	Penelitian tersebut memiliki kesamaan diantaranya untuk menciptakan inovasi dalam sebuah organisasi pemerintahan salah satunya melalui <i>agility</i> yang dalam penelitian terdahulu menggunakan fokus terkait	Penelitian tersebut memfokuskan terhadap pembahasan pelaksanaan <i>e-government</i> dalam organisasi publik di pemerintahan belgia dimana kuesionernya ditujukan kepada mereka yang ahli di bidangnya.	Penelitian ini memiliki posisi yakni menggunakan pisau analisis <i>agile governance</i> terutama untuk mengukur bagaimana inovasi OPD terutama ditengah Pandemi Covid-19 yang perlu selalu ditingkatkan.

			<i>agile e-government</i>		
19	Kil Pyo Hong dan Pan Suk Kim (2020)	<i>Building an Agile Government : It's Possibilities , Challenges, and New Tasks</i>	Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini diantaranya terkait dengan <i>agility</i> dalam ruang lingkup Pemerintah ataupun Organisasi Pemerintahannya	Hasil penelitian tersebut menjabarkan setidaknya terdapat klusterisasi sebelum mencapai sebuah <i>agile government</i> dimana sebuah pemerintahan dituntut untuk dapat menciptakan kebijakan/keputusan yang cepat, fleksibel dan aktif. Untuk menciptakan itu semua, perlu kolaborasi antar pihak serta par pegawai itu sendiri agar maksimal	Penelitian ini memiliki arh penelitian untuk mengetahui <i>agile governance</i> dalam salah satu organisasi publik yang menciptakan inovasi yang bermanfaat ditengah Pandemi Covid-19 yakni Sibakul Jogja.
20	Ralf Martin Soe dan Wolfgang Dreschler (2018)	<i>Agile Local Government s: Experimentation Before Implementation</i>	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada kacamata yang juga membahas terkait <i>agility</i> dalam ruang lingkup pemerintahan lokal.	Penelitian tersebut dimulai dengan membandingkan antara <i>agile governance</i> , <i>adaptive governance</i> dan <i>digital government</i> . Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwasannya untuk mewujudkan konsep <i>agile government</i> pada	Penelitian ini membahas terkait Pemerintahan Provinsi DIY melalui Dinkop UKM DIY yang menciptakan inovasi Sibakul Jogja bagi UMKM jauh sebelum pandemi. Namun, berkat implementasi adanya <i>agile governance</i> yang menuntut

				<p>pemerintahan lokal di Negara finlandia yakni helsinki dan tallinn masih perlu untuk beradaptasi secara cepat terkait pelaksanaan <i>agile government</i> dalam berbagai aspek pemerintahan</p>	<p>inovasi secara cepat maka Sibakul Jogja dapat tercipta dan digunakan ditengah Pandemi Covid-19 yang semua hal kegiatan UMKM konvensional dapat bergeser menuju kegiatan Digital melalui inovasi tersebut.</p>
--	--	--	--	---	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2021

Kajian literatur diatas tentunya menjadi salah satu tolok ukur dari penelitian terkait *Agile governance*. Namun, kita juga perlu untuk menganalisis bagaimana keterkaitan antara penelitian satu dengan lainnya sehingga mampu membedakan antara penelitian/riset yang sedang dilaksanakan dengan penelitian/riset yang terdahulu. Pembahasan secara khusus mengenai *Agile governance* di Indonesia ataupun riset secara internasional masih sangat minim sehingga berbagai macam literatur serta perkembangan kajian dalam penelitian sangat dibutuhkan guna menciptakan peluang riset terbaru di bidang *agile governance*.

Kajian *agile governance* yang sangat penting tetapi masih minim tersebut diulas oleh beberapa pengalaman lain dari berbagai peneliti di penjuru dunia. Soundararajan (2021) dan Holbeche (2019) membahas bahwasannya konsep *agile governance* lahir berdasarkan sifat perusahaan yang perlu untuk selalu cepat dan tanggap dalam melihat keperluan dan perkembangan *client*. Kumorotomo (2020) dalam risetnya tentang pemerintahan yang *agile* membandingkan sebuah terobosan inovasi dari perusahaan jasa di Indonesia yakni Go-Jek yang kemudian

dibandingkan dengan pemerintahan Jepang yang sedang bersiap dalam *society 5.0* dimana pemerintah Indonesia perlu untuk segera berlari dalam menciptakan inovasi-inovasi dan melihat peluang untuk pelayanan masyarakat di era disrupsi teknologi 4.0 (Kumorotomo, 2020). Sehubungan dengan hasil riset tersebut memang secara khusus konsep *agile governance* sudah secara lama melekat dalam sifat perusahaan dan ilmuwan dalam bidang sosial politik pemerintahan melihat bahwasannya konsep tersebut dapat dimasukkan kedalam kajian birokrasi dan pemerintahan.

Terdapat berbagai pengalaman dari peneliti mancanegara yang juga membahas bagaimana implementasi konsep *agile governance* yang diterapkan baik itu sebelum dan ditengah penanganan Pandemi Covid-19. Beberapa penelitian diantaranya Lima dkk (2017) yang membahas penerapan *Agile Governance* di Negara Brazil, Janssen & van der Voort (2020) membahas pengalamannya dalam menerapkan *Agile Governance* di lingkup Pemerintahan Belanda ditengah Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini berjalan baik dan juga Soe & Drechsler (2018) yang membahas terkait *agility* pada Pemerintahan Daerah di Negara Finlandia. Beberapa pengalaman tersebut tentu dikuatkan melalui riset-riset yang memperdalam kajian *agile governance* seperti hasil riset Hong & Kim (2020) terkait tantangannya dalam mewujudkan pemerintahan yang *agile*, Simonofski dkk (2018) yang juga mengkaji tentang transisi pemerintahan tradisional menuju pemerintahan yang *agile* dan Mergel dkk (2018) tentang kajian literatur pemerintahan yang *agile* dan potensi riset masa depan.

Zulyani dan Meiwanda (2020) mengindikasikan bahwa birokrasi di Indonesia perlu menerapkan *agile governance* dikarenakan masih kurangnya kualitas dalam pelayanan publik yang perlu untuk ditingkatkan (Zulyani & Meiwanda, 2020). Aripin dkk (2021) dalam risetnya juga membahas secara spesifik permasalahan yang berlarut terkait kebijakan bagi Pedagang Kaki

Lima yang dalam implementasinya pemerintah kurang tepat untuk menyampaikan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 sehingga perlu untuk menciptakan komunikasi dan implementasi yang *agile* bagi para pelaku PKL di Indonesia (Aripin et al., 2021). Senada dengan hal tersebut, Kurniawan dkk (2020) juga memberikan indikasi bahwasannya banyak inovasi pemerintah daerah yang didasarkan terhadap *Agile governance* dan apabila mampu diterapkan dengan baik dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan meminimalisir *barriers* antara Pemerintah dengan masyarakat (Kurniawan et al., 2020). Oleh karenanya, Vernanda (2020) dalam risetnya memberikan berbagai macam data terutama terkait IT *System* yang perlu ditingkatkan dalam menyambut serta mendukung konsep *agile governance* bagi pemerintahan di Indonesia (Vernanda, 2019). Dari beberapa riset diatas, kajian *agile governance* masih perlu untuk diperluas lagi agar memperkaya literatur serta semakin menciptakan dinamika riset yang berkelanjutan.

Penanganan Pandemi Covid-19 yang saat ini sedang digencarkan baik itu Pemerintah Pusat ataupun Daerah tentu tidak dapat bergerak secara sendirinya melainkan seluruh komponen perlu dilibatkan. Bersinggungan dengan hal tersebut, Sagala dkk (2020) melalui artikelnya membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta beserta jajarannya dalam menciptakan pengendalian Covid-19 dan menurunkan kasus positif Covid-19 secara cepat. Oleh karenanya, birokrasi serta pemerintahan yang *agile* menjadi salah satu terobosan dalam menciptakan penanganan Pandemi Covid-19 (Sagala et al., 2021). Riset yang senada juga dituliskan dalam artikel Apriliyanti dkk (2021) yang membahas perlunya pemerintah menciptakan penanganan Pandemi Covid-19 ditengah budaya masyarakat yang mengakar kuat melalui *agile governance* di Kota Surabaya (Apriliyanti et al., 2021). Kedua riset tersebut memfokuskan pembahasan *agile*

governance kepada sebuah penanganan Pandemi Covid-19 tetapi tidak secara spesifik membahas salah satu inovasi pemerintahan dalam menangani Pandemi Covid-19.

Sebagai konsekuensi dari penerapan konsep *agile governance* tersebut maka pemerintah dari pusat hingga daerah perlu untuk mengimplementasikannya kedalam sebuah inovasi yang berkelanjutan. Salah satu inovasi dari implementasi *agile governance* adalah *platform* Sibakul Jogja yang dikelola oleh dinkop UKM DIY. Melalui kacamata *collaborative governance*, Pertiwi dan Darumurti (2021) memberikan pengertian bahwasannya Sibakul Jogja dikerjasamakan dan dikolaborasikan antar sektor terutama ditengah Pandemi Covid-19 untuk menunjang percepatan penanganan dan respons terhadap menurunnya omzet UMKM di DIY dengan memberikan layanan *free shipping* (Pertiwi & Darumurti, 2021). Disisi lain, pembahasan terkait Sibakul Jogja *free shipping* juga dikaji oleh Faidati dkk (2020) dalam sebuah artikel yang juga bertujuan untuk menciptakan serta meluaskan penjualan dari mitra Sibakul Jogja (Faidati et al., 2020). Hal yang berbeda dikaji oleh Wijayanti dan Widyastuti (2021) yang melakukan pendampingan bagi UMKM yang berada dibawah naungan Sibakul Jogja (Wijayanti & Widyastuti, 2021). Beberapa riset terkait Sibakul Jogja diatas secara keseluruhan belum mengaitkan kedalam sebuah konsep *agile governance* yang kemudian menjadi peluang bagi penelitian ini untuk membahas Sibakul Jogja melalui pisau analisis *agile governance*.

Terdapat juga beberapa kajian inovasi Pemerintahan yang bersinggungan dengan *agile governance* seperti Sibakul Jogja yang menjadi fokus penelitian ini diantaranya seperti Aplikasi PIKOBAR di Jawa Barat (Halim et al., 2021) dan Aplikasi Jogja Istimewa di DIY (Rosilawati et al., 2021). Kedua aplikasi tersebut tidak secara spesifik berfungsi untuk peningkatan penjualan UMKM tetapi lebih kepada pelayanan pemerintah secara elektronik yang berguna terutama dalam penanganan Pandemi Covid-19. Walaupun kedua inovasi tersebut menjadi kajian dari para peneliti

tetapi masih sangat minim untuk mengaitkannya kedalam konsep *agile governance* yang salah satu prinsipnya adalah *simple design and continous refinement* atau sebuah inovasi dapat berkelanjutan dan *user friendly*.

Oleh karena itu, Penelitian ini memiliki posisi yang jelas bahwasannya pembahasan tentang *agile governance* yang masih sangat minim dan juga kajian inovasi pemerintah daerah yakni Sibakul Jogja menjadi menarik untuk dibahas. Selain memperluas kajian dari penelitian yang menggunakan pisau analisis *agile governance* riset ini kedepannya akan sangat berguna bagi kalangan akademisi dan juga praktisi untuk semakin mengembangkan kajiannya. Dengan adanya pembahasan mengenai “Penerapan Agile Governance Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Sibakul Jogja Di Masa Pandemi Covid-19” maka kebaruan dari penelitian ini memiliki posisi serta argumen yang jelas dalam melanjutkan estafet analisis serta riset terkait dengan *agile governance* bagi Pemerintah Daerah ditengah Pandemi Covid-19.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori menjadi salah satu komponen penting dalam mengkaji sebuah penelitian/riset sebagai pen jembatan dan tolak ukur serta membatasi pembahasan agar lebih terstruktur (Al-hamdi et al., 2020:93). Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Agile Governance

a. Definisi Agile Governance

Konsep terkait dengan *agile governance* memang terkesan baru bagi kajian organisasi publik atau pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu *Agile Governance*. *Agile governance* secara harfiah terbagi menjadi dua kata yakni *agile* dan *governance*. *Agile*, merujuk terhadap sebuah kata dalam kosa kata

bahasa inggris yakni *agility* yang berarti cergas sedangkan *governance* memiliki arti yakni tata kelola sehingga *agile governance* merupakan tata kelola pemerintah yang cergas (Hong & Kim, 2020). Pada muasalnya, Overby dkk (2006) berpendapat bahwa konsep terkait dengan *agile governance* merujuk terhadap kajian tentang *software engineering* yang terfokus terhadap perbaikan *software* agar lebih cepat serta adaptif (Janssen & van der Voort, 2020). Semakin berkembangnya zaman, konsep *agile governance* cocok dilaksanakan pada sebuah organisasi publik/pemerintahan yang membutuhkan kecepatan kinerja dan responsibilitas yang tinggi (Zulyani & Meiwanda, 2020)

Agile governance yang berakar dari kajian mengenai *software development* kemudian dengan sangat cepat merambah menuju kajian bagi kegiatan bisnis ataupun organisasi publik. Lebih lanjut lagi, *agile governance* merambah terhadap konsep pelayanan oleh organisasi publik/pemerintahan yang cepat berbasis teknologi informasi (Holbeche, 2019). Perkembangan kajian *agile governance* yang mulai merambah kedalam kajian pemerintahan mulai diaplikasikan seiring dengan kebutuhan secara adaptif oleh kebutuhan zaman dengan respon yang cepat (Martoyo & Sihalo, 2021). Perlunya untuk menerapkan *agile governance* kedalam sebuah organisasi pemerintahan tentu memiliki tujuan yang mulia yakni meningkatkan mutu pelayanan bagi birokrasi di Indonesia tak terkecuali ditengah Pandemi Covid-19.

Tabel 1.2 Definisi Agile Governance

No	Agile Governance	
1	Asal Usul	Sebuah reaksi dari metode perencanaan air terjun (<i>waterfall planning</i>) di <i>software engineering</i> . Kemudian, konsep <i>agile governance</i> berkembang menuju arah kajian organisasi, <i>governance</i> dan Pemerintahan.

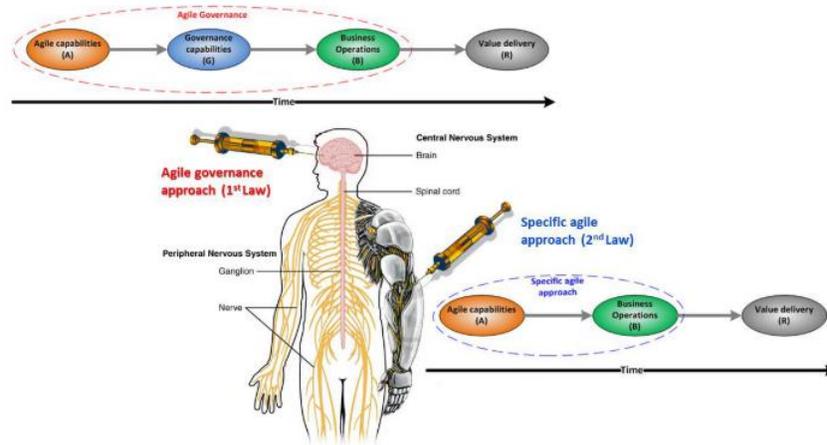
2	<i>Scope</i>	Seringkali dilaksanakan pada proyek inovasi dan pembangunan.
3	Motivasi Utama	Untuk memuaskan pelanggan (Masyarakat/Publik).
4	Tujuan Utama	Menganalisa keadaan dan meresponnya dengan cepat.
5	Tipe dari tujuan pokok permasalahan	Bagi mereka yang terlibat/terfokus dalam perkembangan serta inovasi teknologi, membangun jaringan <i>markets</i> dan kepuasan pelanggan (Masyarakat atau publik)
6	Proses Inti	Bertahap, Inovasi yang selalu bertambah, menerima masukan dengan cepat dan menjadikannya sebagai bahan untuk berkembang, bekerja dengan berbagai macam multidisiplin ilmu.
7	Asumsi	<ul style="list-style-type: none"> - Berfokus terhadap organisasi dan perbaikan internal. - Perubahan melalui teknologi dengan respon yang cepat. - Tata kelola yang jelas dan pasti sehingga memungkinkan percepatan respon. - Menekan pengambilan keputusan yang lama dan berfokus untuk melaksanakan respon cepat. - Perbaikan kecil yang banyak tetapi berkelanjutan. - Perubahan yang cepat sejalan dengan cara kerja yang cepat untuk mencapai solusi maksimal
8	Kritik	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menggantikan pendekatan perencanaan walaupun perencanaan dapat dibutuhkan dalam keadaan tertentu. - Prediksi yang minim serta sulitnya menjaga sebuah inovasi sesuai dengan <i>track</i>-nya. - Fokus terhadap kerjasama eksternal alih-alih memperkenalkan dan memperluas informasi perubahan. - Tantangan bagi tata kelola (<i>governance</i>) karena sumberdaya yang seringkali konstan sehingga prioritas kegiatan diperlukan.

Sumber: Janssen & van der Voort (2020)

Walaupun terdapat banyaknya dinamika hingga kritik terhadap *agile governance* terdapat kesimpulan secara keseluruhan bahwasannya konsep *agile governance* terhadap birokrasi/organisasi publik sangatlah dibutuhkan. Walaupun seperti itu, konsep *agile governance* juga tidak dapat menjadi patokan kesesuaiannya dengan birokrasi di Indonesia dikarenakan tidak ada satupun konsep yang dapat sesuai didalam pengelolaan organisasi publik/birokrasi di Indonesia (Mergel et al., 2018). Dengan menerapkan *agile governance* pada birokrasi di Indonesia maka akan terdapat adanya sebuah bentuk akuntabilitas yang tinggi, penyesuaian organisasi dan kebijakan agar konsep ini dapat dijalankan walaupun perlu memakan waktu dan penyesuaian (Aripin et al., 2021).

Agile governance yang diterapkan secara lebih cepat kepada sektor swasta kemudian memberikan benefit yang meningkat dengan cepat. Oleh karenanya, melalui *world bank* konsep tersebut mulai diimplementasikan pada skala yang lebih besar yakni sektor organisasi publik/pemerintahan (Kumorotomo, 2020). Pendekatan bisnis yang dimiliki oleh *agile governance* diharapkan membawa arah birokrasi atau organisasi pemerintahan menjadi lebih adaptif dan inovatif (Lima et al., 2017). Luna dkk (2015) menguatkan melalui penjelasan bahwasannya *agile governance* dapat tercipta disaat kapabilitas yang *agile* dapat bertemu dan terkoordinasi dengan *government capabilities* yang akan meingkatkan *value delivery*. Oleh karenanya, Luna dkk (2015) kembali menggambarkan bagaimana proses *agile governance* dapat diimplementasikan melalui gambaran anatomi manusia.

Gambar 1.1 Alur Implementasi *Agile Governance*



Sumber: Luna dkk (2015)

Gambar diatas (Lihat Gambar 1.1) menunjukkan terdapat 2 cara dalam mengimplementasikan *agile governance*. Yang pertama (*1st law*) adalah dengan melibatkan *agile capabilities* + *governance capabilities* dan *business operations* dengan kolaborasi yang baik dan kuat maka akan meningkatkan *value delivery* konsumen (Masyarakat) (Rahman et al., 2020). Pendapat yang serupa tapi tidak sama oleh Luna dkk (2015) bahwasannya untuk menciptakan pendekatan yang *agile* secara spesifik (*2nd law*) maka dapat dilaksanakan melalui kolaborasi dari adanya *agile capabilities* + *business operations* yang dapat diimplementasikan tidak hanya didalam organisasi pemerintahan tetapi pada sektor swasta maka akan menaikkan *added value*.

Oleh karena itu, konsep *agile governance* melalui berbagai macam pandangan setidaknya memberikan gambaran baik itu kepada para pemerintah ataupun sektor terkait untuk bersama mengimplemetasikannya (Sagala et al., 2021). Walaupun *agile governance* secar konsep sangatlah bagus, tetapi hal tersebut tentu akan sangat berbeda dan memerlukan waktu yang lama dalam implementasinya di lapangan (Holbeche, 2019). Pematangan konsep tersebut perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia dan juga

Sumber Daya pendukung yang memadai seperti Infrastruktur, Teknologi, Jaringan dan lain sebagainya agar *agile governance* dapat dijalankan secara maksimal pada organisasi publik khususnya pemerintahan.

b. Kerangka Agile Governance

Konsep *agile governance* yang sudah dipaparkan diatas tentu tidak akan lengkap apabila kita belum membahas bagaimana kerangka dari konsep *agile governance* itu sendiri. Shah dan Stephens (2005) (dalam Lima dkk, 2017) memberikan gambaran bahwasannya terdapat 8 area yang perlu dipenuhi dalam menciptakan sebuah *agile governance* di lingkungan organisasi (baik itu organisasi swasta maupun pemerintahan) diantaranya:

Gambar 1.2 Kerangka Konsep *Agile Governane* bagi Organisasi Publik



Sumber: Shah dan Stephens (dalam Lima dkk, 2017)

Terdapat 8 Area yang menjadi karakteristik dari adanya birokrasi atau organisasi publik yang *agile* diantaranya:

1. *Governance*: Sebuah organisasi yang *Agile* perlu untuk memiliki sebuah struktur yang baik dalam mewujudkan pengambilan keputusan secara cepat dan dapat diimplementasikan.
2. *Strategic planning*: seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya dalam mewujudkan dan mengimplementasikan sebuah inovasi maka perlu adanya perencanaan strategis yang matang (Seperti: RPJPD, RPJMD, Renstra dsb).
3. *Performance Measurement*: sebuah organisasi yang efektif perlu untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan serta inovasinya dapat berjalan dengan baik setelah diimplementasikan melalui monitoring secara berkala dan berkelanjutan.
4. *Citizens/Customer Focus*: Organisasi Publik/Pemerintah perlu memastikan bahwasannya seluruh metode serta proses pelayanannya berpihak terhadap rakyat/masyarakat.
5. *Efficient and effective process*: Pemerintah beserta jajarannya perlu memastikan bahwasannya seluruh proses pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat.
6. *Effective Communications*: Komunikasi menjadi salah satu kunci utama dalam melaksanakan berbagai macam proses pemerintahan sehingga keefektifan dalam melaksanakan komunikasi baik itu dalam internal pemerintahan dan juga pihak eksternal (Mitra, Masyarakat, LSM dsb) menjadi sebuah *important thing* yang harus diterapkan.
7. *Culture of Change*: Hal yang sangat penting untuk diimplementasikan kedalam sebuah tata kelola yang cergas kemudian adalah adanya budaya untuk selalu dan mau berbenah menuju ke arah yang lebih baik. Tentu, hal ini dapat dimulai dari seorang

pimpinan dan diterapkan kepada seluruh pegawai agar menjadi sebuah budaya baru dalam birokrasi organisasi publik/pemerintahan.

8. *Dynamic Technology Infrastructure*: Setelah seluruh proses dapat tercapai maka salah satu tahapan yang penting adalah melalui adanya infrastruktur teknologi yang dinamis mengikuti kebutuhan serta perkembangan zaman.

c. Prinsip-Prinsip Agile Governance

Prinsip dalam *Agile governance* juga menjadi salah satu hal yang penting untuk dijabarkan dalam memperkaya kajian kita terhadap *agile governance*. Luna dkk (2015) memberikan 6 Prinsip yang perlu untuk diketahui dan juga menjadi landasan praktis dalam mengimplementasikan *agile governance* diantaranya adalah:

1. *Good enough governance*: Organisasi pemerintahan yang baik membutuhkan sebuah tata kelola yang baik juga. Hal tersebut menjadi penyeimbang dalam menerapkan serta mengimplementasikan konsep *agile governance* terutama pada birokrasi di Indonesia.
2. *Business-Driven*: Konsep dari *agile governance* perlu untuk diimplementasikan terhadap kesejahteraan rakyat. Organisasi publik/pemerintahan dituntut dalam membantu memberikan inovasi serta ide dalam juga mendukung perkembangan perekonomian kerakyatan dan pemerataan infrastruktur.
3. *Human Focused*: Menjadi sebuah kewajiban bahwasannya organisasi pemerintahan perlu untuk memiliki fokus utama dalam melayani masyarakat dengan tidak membedakan suku, ras dan agama
4. *Based on quick wins*: Adanya perubahan keadaan sosial masyarakat yang relatif cepat menuntut pemerintah melalui para birokrasinya didalam sebuah organisasi pemerintahan memiliki inovasi yang tanggap, inovatif, cepat dan tepat.

5. *Systematic and adaptive approach*: Pendekatan dalam mengimplementasikan konsep perlu dilakukan secara sistematis dan adaptif agar mendapatkan hasil yang maksimal.
6. *Simple Design and Continous refinement*: sebuah inovasi yang tercipta dituntut memiliki keberlanjutan guna bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

d. Karakteristik Agile Governance

Karakteristik yang melekat oleh *agile governance* tentu menjadi pembeda dengan *governance* pada umumnya. Beck (dalam Luna dkk, 2015) memberikan catatan kritisnya untuk membedakan antara karakteristik kinerja organisasi yang *agile* dengan organisasi pada umumnya sebagaimana berikut:

1. *Agile governance* lebih menekankan untuk meningkatkan *behavior* dan *practices* dibandingkan dengan *Conventional Governance* yang menekankan terhadap *process* dan *procedures*.
2. *Agile Governance* menekankan terhadap sebuah inovasi yang kompetitif dan berkelanjutan dibandingkan *conventional governance* yang hanya berorientasi terhadap proses audit dan kesesuaiannya.
3. *Agile Governance* lebih menekankan terhadap keterikatan antar pegawai dan transparansi dibandingkan *conventional governance* yang hanya berorientasi terhadap monitoring dan kontroling.
4. *Agile governance* berfokus terhadap respon yang adaptif dibandingkan *conventional governance* yang berfokus hanya mengikuti arahan.

G. Definisi Konseptual

Setelah melalui berbagai macam dinamika diskusi terkait kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini maka beberapa definisi secara konseptual dapat tergambarakan sebagaimana berikut:

1. *Agile Governance*: melalui pendalaman materi serta hasil telaah dari berbagai macam sumber maka secara konseptual *Agile Governance* merupakan sebuah bentuk pelayanan bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun Organisasi Publik dibawah pemerintah yang mengharuskan pelayanan dapat dilaksanakan dengan cergas, tepat, cepat dan memperhatikan perkembangan serta kebutuhan zaman agar dapat menjaga *sustainability* didalam proses/hubungannya antara Pemerintah dengan Masyarakat.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional memiliki urgensitas untuk membatasi gejala-gejala sosial yang akan menjadi fokus penelitian. Kajian yang berada dalam definisi operasional berisi batasan-batasan dalam penelitian agar penulis memudahkan untuk mengambil sebuah fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, penulis tidak mengambil seluruh penjabaran secara teoritis melainkan hanya memasukkan beberapa teori yang fungsional (Al-hamdi et al., 2020:97). Penggunaan teori yang fungsional tersebut menyesuaikan dengan data yang didapatkan melalui studi penelitian lapangan . Berikut beberapa batasan-batasan maupun gejala-gejala sosial yang sesuai dengan ketersediaan data di lapangan:

1. Prinsip-Prinsip *Agile Governance*
 - a. *Good enough governance*: Organisasi pemerintahan yang baik membutuhkan sebuah tata kelola yang baik juga. Hal tersebut menjadi penyeimbang dalam menerapkan serta mengimplementasikan konsep *agile governance* terutama pada birokrasi di Indonesia.

- b. *Business-Driven*: Konsep dari *agile governance* perlu untuk diimplementasikan terhadap kesejahteraan rakyat. Organisasi publik/pemerintahan dituntut dalam membantu memberikan inovasi serta ide dalam juga mendukung perkembangan perekonomian kerakyatan dan pemerataan infrastruktur.
- c. *Human Focused*: Menjadi sebuah kewajiban bahwasannya organisasi pemerintahan perlu untuk memiliki fokus utama dalam melayani masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, ras dan agama
- d. *Based on quick wins*: Adanya perubahan keadaan sosial masyarakat yang relatif cepat menuntut pemerintah melalui para birokrasinya didalam sebuah organisasi pemerintahan memiliki inovasi yang tanggap, inovatif, cepat dan tepat.
- e. *Systematic and adaptive approach*: Pendekatan dalam mengimplementasikan konsep perlu dilakukan secara sistematis dan adaptif agar mendapatkan hasil yang maksimal.
- f. *Simple Design and Continous refinement*: sebuah inovasi yang tercipta dituntut memiliki keberlanjutan guna bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

Tabel 1.3 Variabel, Indikator dan Parameter Agile Governance

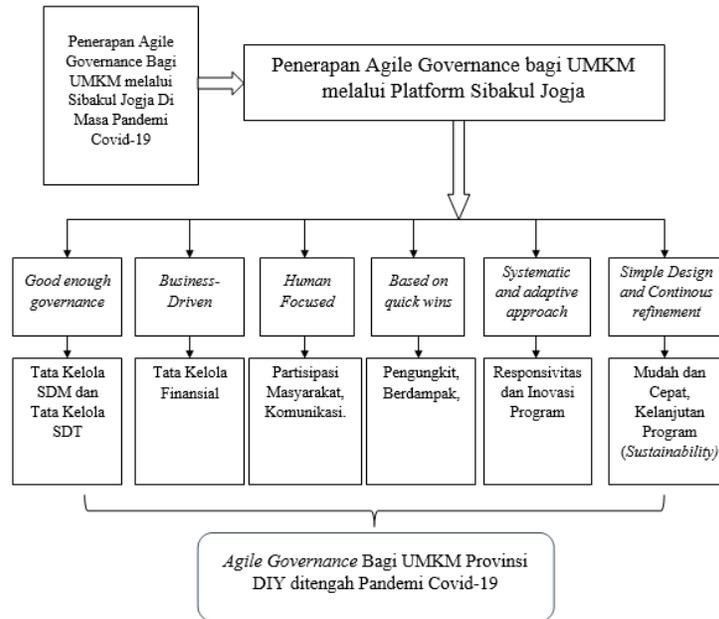
No	Variabel	Indikator	Prameter
1	Agile Governance	<i>Good enough governance</i>	- Tata Kelola SDM - Tata Kelola SDT
2		<i>Business-Driven</i>	- Tata Kelola Finansial
3		<i>Human Focused</i>	- Partisipasi Masyarakat - Komunikasi
4		<i>Based on quick wins</i>	- Pengungkit - Berdampak
5		<i>Systematic and adaptive approach</i>	- Responsivitas - Inovasi Program
6		<i>Simple Design and Continous refinement</i>	- Mudah dan Cepat - Kelanjutan Program (<i>Suistainability</i>).

Sumber: Olahan Peneliti dari berbagai Sumber, 2021.

I. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir tentu akan memudahkan peneliti dan pembaca dalam memberikan wawasannya serta tujuan arah penelitian yang dilaksanakan. Berikut kerangka berfikir yang disajikan untuk penelitian ini:

Gambar 1.3 Alur Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Melalui gambar serta alur penelitian tersebut maka peneliti mampu memberikan gambaran arah dari upaya untuk mendapatkan sebuah jawaban dalam penelitian. Peneliti berusaha untuk membedah penyelenggaraan *agile governance* bagi UMKM melalui Sibakul Jogja Ditengah Pandemi Covid-19.

J. Metode Penelitian

Penelitian yang baik tentu membutuhkan sebuah alat untuk menganalisis atau sering disebut sebagai metode penelitian yang tepat. Metode penelitian perlu disesuaikan untuk dapat menjawab persoalan penelitian dengan menginterpretasikan hasil temuannya secara maksimal (Sugiyono, 2019:282). Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif. Secara lebih lanjut beberapa penjelasan terkait dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan dijabarkan secara lebih mendalam melalui beberapa hal berikut:

1. Jenis Penelitian

Seperti yang sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwasannya penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan sebuah fenomena ataupun temuan yang didapatkan melalui proses dalam riset/penelitian (Anggito & Setiawan, 2018:11). Denzin dan Lincoln (dalam Al-hamdi dkk, 2020:3) juga menyebutkan bahwasannya penelitian kualitatif merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menginterpretasikan atau menafsirkan terhadap sebuah relitas problematika pembahasan yang difahami betul oleh seorang peneliti. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Sugiyono (2019:283) bahwasannya penelitian kualitatif memerlukan kemampuan dan pemahaman yang tinggi dikarenakan seorang peneliti kualitatif harus memiliki pemahaman terhadap teori yang luas dan menjadi "*human instrumentaI*" yang baik.

Deskriptif menurut Sukmadinata (dalam Linarwati, 2016) mendefinisikan bahwa deskriptif merupakan suatu bagian yang penting dalam penelitian dikarenakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi sehingga membedakan fenomena yang satu dengan yang lainnya bisa dalam segi bentuk, karakteristik, dan lainnya. Menurut Furchan (dalam Linarwati, 2016) penelitian deskriptif adalah proses penelitian yang tepat dirancang untuk memperoleh informasi terkait suatu gejala yang sedang berkembang secara kompleks. Penelitian deskriptif hadir untuk menjabarkan dan menginterpretasikan sebuah penelitian berdasarkan hasil kaji gejala sosial di lapangan.

Penelitian kualitatif seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli diatas menjadi landasan pemahaman peneliti dalam melaksanakan alur penelitian. Disisi lain, kegiatan penelitian kualitatif deskriptif ini dilaksanakan melalui pendekatan studi kasus. Pendekatan

studi kasus menjadi salah satu dari 5 pendekatan-pendekatan dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan pandangan Creswell (dalam Al-hamdi dkk, 2020:31) dijelaskan bahwasannya pendekatan studi kasus merupakan sebuah penelitian intensif yang mengkaji satu kasus tertentu atau lebih (perbandingan) ataupun sebuah keputusan tertentu atau lebih (perbandingan) dengan melibatkan berbagai macam data baik itu wawancara, dokumentasi, dokumen, rekaman audio-visual guna mendapatkan jawaban secara utuh dari sebuah kasus yang menjadi fokus peneliti.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka penelitian ini menjadikan metode kualitatif deskriptif sebagai pisau analisis dalam melaksanakan penelitian kedepannya. Disisi lain, Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dikarenakan perlu untuk mengkaji sebuah kasus yang terjadi dan menemukan relevansinya terhadap sebuah teori yang digunakan oleh peneliti. Studi Kasus dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Disisi lain, untuk mendapatkan keabsahan data dan interpretasi yang maksimal maka peneliti juga akan menjadikan Masyarakat pengguna Sibakul Jogja menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan mengambil lokasi penelitian pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna mengumpulkan dan menghimpun data yang dibutuhkan terkait dengan *Agile Governance* bagi pelaku UMKM di Provinsi DIY yakni Sibakul Jogja.

3. Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini merujuk terhadap data-data yang didapatkan berdasarkan penerjunan peneliti secara langsung di lapangan (Sugiyono, 2019:10). Oleh karena itu, penelitian ini akan memaksimalkan penelitian secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa langkah seperti wawancara dan Dokumentasi kepada pihak terkait yakni Pihak Pengguna layanan Sibakul Jogja yang menjadi salah satu aktor dalam menggerakkan produknya didalam layanan Sibakul Jogja.

Tabel 1.4 Daftar Narasumber

No	Narasumber	Instansi/Jabatan
1	Hana Fais Prabowo, S.T.P., M.Si.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY
2	Wahyu Tri Atmojo, S.Pd.	Konsultas Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah DIY (PLUT-KUMKM DIY)
3	Mila	Koperasi UMKM Jogja Karya Nyawiji (JKN)
4	Prillasita Ayu Kusuma	UMKM Sibakul Jogja (Kabupaten Sleman)
5	Fajar Sulthoni Aziz	UMKM Sibakul Jogja (Kabupaten Sleman)
6	Sumartono	UMKM Sibakul Jogja (Kabupaten Kulon Progo)
7	Kapti Purnawan	UMKM Sibakul Jogja (Kota Yogyakarta)
8	Dian Yuniati Rahayu	UMKM Sibakul Jogja (Kota Yogyakarta)

9	Candra Nur	UMKM Sibakul Jogja (Kabupaten Gunung Kidul)
10	Panggih Triatmoko	UMKM Sibakul Jogja (Kabupaten Gunung Kidul)
11	Nadira Puspita	UMKM Sibakul Jogja (Kabupaten Sleman)
12	Maria Ulfa	UMKM Sibakul Jogja (Kabupaten Sleman)

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini akan merujuk terhadap berbagai macam informasi yang didapatkan oleh berbagai macam sumber sebagai pendukung data primer (Sugiyono, 2019:10). Penelitian ini akan menggali informasi dari berbagai macam sumber baik itu melalui dokumen-dokumen pemerintah, peraturan-peraturan, media massa, media online dan media sosial agar mendapatkan keseluruhan data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Data sekunder dapat diperoleh melalui website DiskopUKM DIY, Instagram, twitter ataupun youtube dari dinkop UKM DIY dan Sibakul Jogja. Disisi lain, peneliti juga akan memperhatikan dinamika pembahasan mengenai Sibakul Jogja walaupun kajian yang merujuk terhadap *agile governance* masih sangat minim.

Tabel 1.5 Rincian Data Sekunder

No	Nama Data	Sumber Data
1	Daftar Perjanjian Kerjasama Sibakul Jogja dengan pihak ketiga	Laporan Sibakul Jogja tahun 2020 dan 2021
2	Sosialisasi dan Pelatihan Sibakul Jogja	Website Sibakul Jogja (Sibakuljogja.jogja.jogjaprov.go.id, Instagram (Sibakul_Jogja), Twitter (@DIYUKM), Youtube (Dinas Koperasi dan UKM DIY).
3	Rekap Pendapatan Sibakul Jogja	Laporan Tahunan Sibakul Jogja 2020 dan 2021

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

c. Teknik Pengumpulan Data

Data menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam melaksanakan penelitian. Oleh karenanya, untuk mengumpulkan data memerlukan sebuah teknik yang tepat dengan menggunakan 2 jenis data sekaligus yakni triangulasi data (Sugiyono, 2019:316). Walaupun dalam penelitian kualitatif tujuan utamanya bukan untuk menemukan kebenaran melainkan untuk memahami subjek terhadap dunia sekitarnya tetap menjadi hal yang wajib bahwasannya peneliti dapat menganalisis beberapa sumber data menjadi sebuah interpretasi yang dapat dimengerti oleh semua pihak. Terdapat 2 jenis data dalam triangulasi yakni: a) Wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dan b) Dokumentasi. Kedua data tersebut menjadi sebuah alat untuk mengetahui keabsahan data dan pemahaman terhadap objek yang diteliti.

K. Teknik Analisis Data

Analisis Data menjadi salah satu rangkaian dalam melaksanakan penelitian. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya analisis data maka peneliti mampu mengetahui interpretasi dari data yang didapatkan melalui beberapa metode seperti yang telah disebutkan sebelumnya (Anggito & Setiawan, 2018). Moleong (dalam Al-hamdi et al., 2020:122) menjelaskan bahwasannya Analisis data merupakan sebuah upaya untuk mengorganisasikan data sehingga dapat dikelola oleh peneliti dan dapat diinterpretasikan untuk diceritakan kepada para pembaca/pihak yang berkepentingan. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019:322) menjabarkan pendapatnya mengenai teknik analisis data secara *interactive model* diantaranya:

1. Data Collection/ Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode serta teknik pengumpulan seperti yang terdapat pada pembahasan sebelumnya. Peneliti berusaha untuk mendapatkan

narasumber baik itu dari pihak Dinas Koperasi dan UKM DIY dan Pengusaha yang tergabung didalam Sibakul Jogja. Pengumpulan data dilaksanakan melalui proses sampling dengan menggunakan nonprobabilitas sampling yakni *purposive sampling*. Pengumpulan data secara *purposive* merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan narasumber yang telah dipilih secara teliti dengan pertimbangan bahwa narasumber yang dituju tepat dan dapat menjabarkan sebuah kasus yang sedang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2019;289).

Pemilihan narasumber yakni UMKM melalui *purposive sampling* adalah dengan memilih UMKM yang memiliki nilai hasil tertinggi dan terendah berdasarkan penilaian UMKM dan Kesehatan Koperasi melalui sistem Sibakul Jogja. disisi lain, pemilihan juga dilakukan dengan memilih dari beberapa UMKM yang berada di setiap Kabupaten di Provinsi DIY dan Perwakilan Koperasi yang menaungi beberapa UMKM dibawah Sibakul Jogja. Pengumpulan data juga dilakukan dengan memperhatikan triangulasi data yakni: a) Wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dan b) Dokumentasi.

2. Data Reduction/Reduksi Data

Setelah data dikumpulkan dan terhimpun didalam sebuah dokumen yang tersimpan rapih maka perlu untuk dilakukan reduksi data (Pemilihan data yang memungkinkan dan tidak memungkinkan). Hal ini menjadi tahapan yang penting dimana peneliti memasukkan hasil penelitian kepada indikator dan memilih bagian mana yang baru, unik dan lain sebagainya (Sugiyono, 2019:324). Reduksi data memerlukan keseriusan dan penalaran yang kritis secara cepat dan menjadi bagian yang paling sensitif dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu berhati-hati dalam menginterpretasikan hasil penelitian agar sesuai dengan kondisi lapangan.

3. *Data Display*/Penyajian Data

Data display menjadi salah satu hal yang sangat penting dikarenakan dengan penyajian data maka peneliti mampu untuk memberikan gambaran secara deskriptif ataupun visual hasil dari penelitiannya. Beberapa penyajian data diantaranya adalah adanya tabel, grafik, gambar-gambar, pola keterhubungan, *pie card* dan lain sebagainya. Penyajian data memerlukan kejelian dan juga ketelitian yang tinggi agar dapat merepresentasikan hasil temuan dengan gambar/grafik yang disajikan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam menjalankan sebuah penelitian adalah dengan memberikan penarikan kesimpulan yakni sebuah narasi atau interpretasi terhadap keseluruhan hasil penelitian. Setelah menyajikan kesimpulan awal tersebut maka peneliti pun perlu melaksanakan verifikasi data dan hasil penelitian agar mampu meminimalisir kesalahan dalam keabsahan data. Kesimpulan dalam kualitatif berisi terkait penemuan-penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.